



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

TAHUN 2021



LKjIP

**Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Nganjuk**

DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Dasar Hukum, Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
1.2. Struktur Organisasi	5
1.3. Isu strategis / permasalahan utama pembangunan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2021.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
2.1. Rencana Strategik Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	11
2.1.1 Visi.....	11
2.1.2 Misi	11
2.1.3 Tujuan.....	11
2.1.4 Sasaran	12
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	12
2.2.1. Sasaran dan Program Pembangunan.....	12
2.2.2. Standar Penilaian Kinerja.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1. Capaian Kinerja	16
3.2. Realisasi Anggaran	26
BAB IV PENUTUP	34

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Administrasi Personil Menurut Golongan	7
Tabel 1.2 Data Administrasi Personil Menurut Pendidikan	7
Tabel 1.3 Data Administrasi Personil Menurut Jabatan	8
Tabel 1.4 Data Aset Dinas	8
Tabel 2.1 Sasaran	12
Tabel 2.2 Program/Kegiatan 2021	13

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk, bahwa Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1.1.1 Tugas Pokok

Membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengelolaan, koordinasi dan mengendalikan seluruh kegiatan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan.

1.1.2 Fungsi

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai fungsi:

- a) Perencanaan dan koordinasi penyediaan infrastruktur bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
- b) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
- c) Pelaksanaan pembinaan umum, teknis dan operasional bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d) Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian rencana dan program pembangunan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
- e) Pemberian rekomendasi untuk kegiatan yang berkaitan dengan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
- f) Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas;
- g) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;

- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan koordinasi, pengawasan, ketatausahaan dan membagi tugas kegiatan bawahan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan.

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tatausaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksana koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan barang milik daerah;
- d. pembinaan aparatur;
- e. pengelolaan urusan kepegawaian;
- f. pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
- g. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan barang milik negara dan daerah;
- h. pembinaan dan koordinasi urusan kepegawaian;
- i. pengelolaan administrasi jabatan fungsional; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Perumahan Rakyat

Bidang Perumahan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perumahan rakyat.

Bidang Perumahan Rakyat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan penetapan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) di bidang perumahan rakyat;

- b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perumahan rakyat yang meliputi penetapan kebijakan strategis, pengelolaan dan pemeliharaan perumahan rakyat;
- c. Perencanaan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi Program Kabupaten;
- d. Pelaksanaan Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi Program Kabupaten;
- e. Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi Program Kabupaten;
- f. Pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi Program Kabupaten;
- g. Pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan /atau rumah khusus;
- h. Penerbitan ijin pengembangan dan pembangunan perumahan;
- i. Penerbitan sertifikat ijin kepemilikan gedung (SKGB);
- j. Peningkatan prasarana sarana utilitas umum (PSU);
- k. Pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan rakyat;
- l. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKGB);
- m. Pelaksanaan Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) tingkat kemampuan kecil;
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Bidang Kawasan Pemukiman dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pemukiman dan pertanahan.

Bidang Kawasan Pemukiman dan Pertanahan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kawasan permukiman dan pertanahan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kawasan permukiman dan pertanahan;
- c. Penerbitan ijin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;

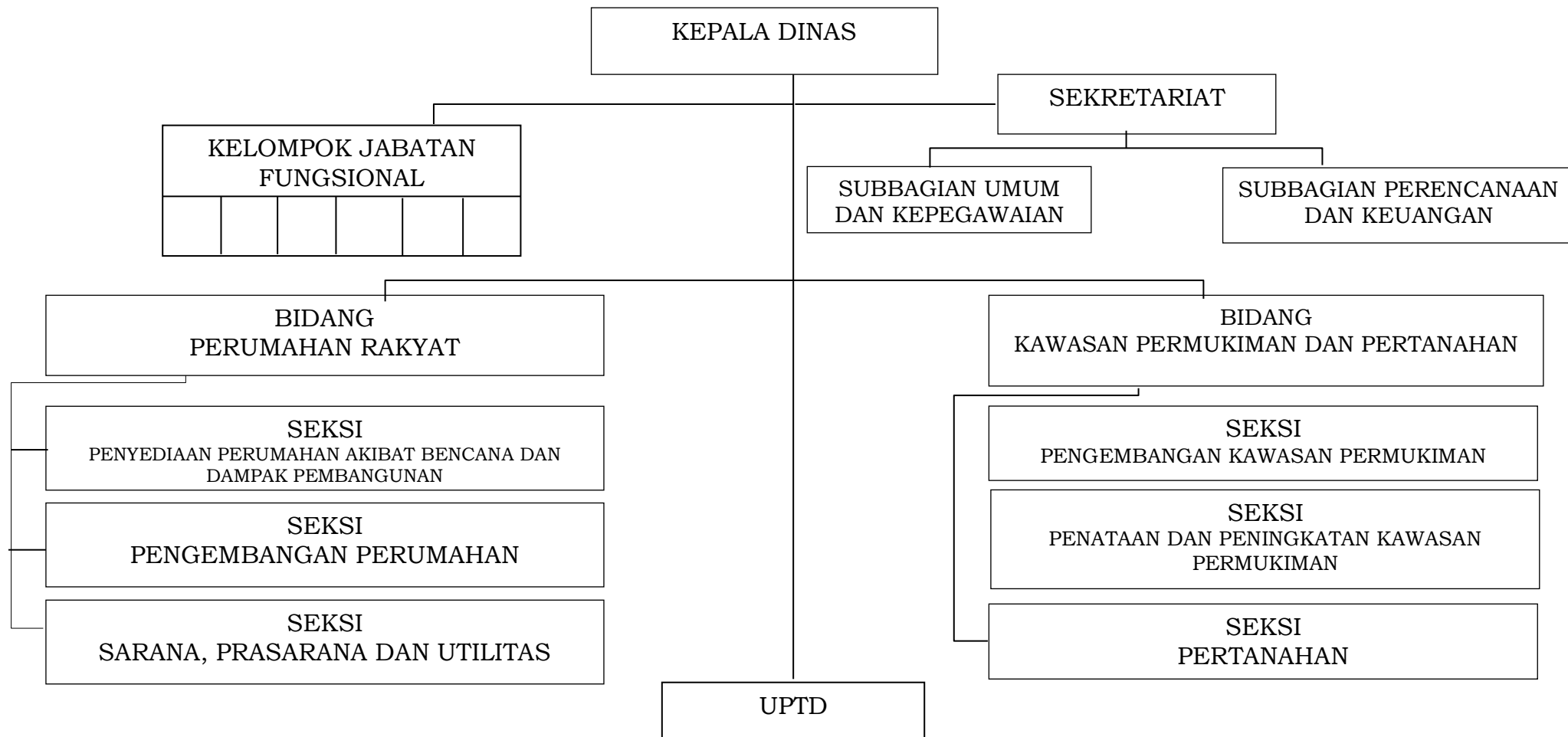
- d. Penataan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha;
- e. Pemberian ijin lokasi dalam 1 (satu) Kabupaten dalam rangka penanaman modal dan kemudahan berusaha;
- f. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
- g. Penyelesaian masalah tanah kosong, pengelolaan ijin membuka tanah dan penatagunaan tanah;
- h. Pelaksanaan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong;
- i. Penerbitan ijin membuka tanah;
- j. Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu Kabupaten;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2. Struktur Organisasi

Sebagai upaya mewujudkan keseimbangan dan keterkaitan antar bidang serta memantapkan pelayanan dan dukungan terhadap pembangunan, maka, secara garis besar struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan permukiman dan Pertanahan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - (1). Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - (2). Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Perumahan Rakyat, terdiri dari :
 - (1). Seksi Penyediaan Perumahan Akibat Bencana dan Dampak Pembangunan;
 - (2). Seksi Pengembang Perumahan;
 - (3). Seksi Sarana, Prasarana dan Utilitas;
- d. Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan, terdiri dari :
 - (1). Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman;
 - (2). Seksi Penataan dan Peningkatan Kawasan Permukiman;
 - (3). Seksi Pertanahan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN NGANJUK



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya saat ini Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk didukung oleh personil dan perlengkapan sebagai berikut :

a. Personil :

Tabel 1.1: Data Administrasi Personil Menurut Golongan

URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1. Golongan I	Orang	10
2. Golongan II	Orang	23
3. Golongan III	Orang	20
4. Golongan IV	Orang	4
5. Non ASN	Orang	16
Jumlah	Orang	73

Data : per Des 2021

Tabel 1.2 : Data Administrasi Personil Menurut Pendidikan

URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1. SD dan SLTP	Orang	12
2. SLTA	Orang	27
3. D2	Orang	1
4. D3	Orang	3
5. SI	Orang	25
6. S2	Orang	5
7. S3	Orang	-
Jumlah	Orang	73

Data : per Des 2021

Tabel 1.3: Data Administrasi Personil
Menurut Jabatan

URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1. Eselon II	Orang	1
2. Eselon III	Orang	3
3. Eselon IV	Orang	9
4. Jabatan Fungsional	Orang	-
5. Staf	Orang	44
6. THL	Orang	16
Jumlah	Orang	73

Data : per Des 2021

b. Perlengkapan

Tabel 1.4: Data Aset Dinas

URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1. Mobil Dinas	Unit	4
2. Sepeda motor	Unit	12
3. Tanah	Unit	2
4. Bangunan Gedung	Unit	2
Jumlah	Unit	20

Data : per Des 2021

1.3. Isu strategis / permasalahan utama pembangunan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2021

Permasalahan Internal :

- Kurang tertibnya penanganan pengendalian dokumen kegiatan yang sudah dilaksanakan sehingga terjadi keterlambatan bila diperlukan untuk penyusunan laporan.
- Kurang tepatnya penyusunan program kegiatan dengan rencana pencairan keuangan sehingga pelaksanaan kegiatan tidak sesuai rencana.
- Perencanaan sistem pengelolaan drainase belum didasari dengan adanya suatu rencana induk pengelolaan sistem drainase yang absah. Sementara itu, ketidakjelasan pengelola sistem drainase, menyebabkan pengabaian kondisi saluran drainase.

- d. Masih belum adanya batasan pembangunan jalan Lingkungan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa dengan SKPD terkait
- e. Masih belum tersusunnya dokumen daerah rawan air dan potensi sumber air.

Permasalahan Eksternal :

- a. Tuntutan masyarakat dalam memperoleh pelayanan Air Bersih, pembangunan jalan lingkungan dan Rumah Layak Huni.
- b. Kurangnya kepedulian masyarakat / kelompok HIPPAM dalam memelihara sarana dan prasarana air bersih dan Sanitasi yang telah dibangun pemerintah daerah.
- f. Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau.
- g. Menurunnya kualitas lingkungan permukiman dan meningkatnya luasan kawasan kumuh.
- h. Masih terbatasnya penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman dikawasan tertinggal, dan dikawasan pinggiran hutan di perdesaan
- i. Masih belum efektifnya penerapan konsep pengendalian permukiman melalui dukungan prasarana dan sarana dasar permukiman Kasiba/Lisiba.
- j. Kurangnya penyiapan dan penyediaan lahan untuk perumahan yg dikelola oleh pemerintah daerah
- k. Stagnasi dalam penanganan tingkat kebocoran air (teknis maupun non teknis)
- l. Pada beberapa daerah terjadi konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumber air baku. Hal ini disebabkan adanya kepentingan peruntukan sumber air tersebut untuk non air bersih, maupun karena kendala batas administrasi wilayah.
- m. Kurang berfungsinya saluran drainase sebagai pematas air hujan, hal ini disebabkan antara lain karena masyarakat membuang sampah ke saluran drainase, akibat dari rendahnya penegakan hukum khususnya dalam pemanfaatan badan air termasuk saluran drainase di kawasan perkotaan.
- n. Penanganan masalah genangan di kawasan perkotaan masih secara parsial dan tidak konseptual karena terbatasnya dokumen perencanaan induk dan perencanaan detail drainase dapat dipakai sebagai acuan dalam menyusun rencana tindak.
- o. Memburuknya kualitas fisik kawasan perkotaan, serta menurunnya kualitas hidup masyarakat perkotaan karena keterbatasan pelayanan kebutuhan dasar

perkotaan yang berdampak menambah luasan kawasan kumuh perkotaan, hal ini lebih-lebih dipicu dengan adanya pertumbuhan PKL yang tidak terkendali

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Stratejik Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

2.1.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Nganjuk maka Visi pembangunan yang menjadi acuan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Nganjuk Yang Maju dan Bermartabat (Nganjuk Nyawiji Mbangun Deso Noto Kutho).”

2.1.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan. Misi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

“Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perlindungan dari bencana”.

2.1.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai melalui penentuan visi dan misi diatas adalah :

Dari Misi ” Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perlindungan dari bencana” dijabarkan kedalam tujuan Meningkatkan Insfrastruktur dasar perumahan dan permukiman.

2.1.4 Sasaran

Dari tujuan yang telah ditentukan, kemudian dijabarkan dalam bentuk sasaran yang mudah terukur dengan rumusan-rumusan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tujuan ” Meningkatkan Insfrastruktur dasar perumahan dan permukiman” dijabarkan dalam sasaran Meningkatnya Perumahan dan Permukiman yang layak huni dan Meningkatnya Penyelesaian Masalah Pertanahan.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

2.2.1. Sasaran dan Program Pembangunan

Sasaran dan program pembangunan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk yang ingin dicapai pada tahun 2021 sebanyak 2 sasaran dengan 3 indikator kinerja dan targetnya sebagai berikut :

Tabel 2.1 Sasaran

Sasaran		Indikator		Target (%)
1		2		3
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman	1.	Persentase Penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan air bersih dengan sistem perpipaan dan non perpipaan	83,36
		2.	Persentase sistem air limbah skala Rumah Tangga/komunitas/kawasan/kota	64,03
		3.	Persentase Pemenuhan drainase lingkungan	89,69
		4.	Persentase Pemenuhan kebutuhan jalan lingkungan	79,45
		5.	Persentase pengurangan kawasan kumuh	90,71
2.	Meningkatnya perumahan yang berkualitas	1	Persentase rumah layak huni	92,21

Tabel 2.2 Program/Kegiatan Tahun 2021

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	4.935.397.230,00
2.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.676.597.550,00
3.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 1 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.774.150.400,00
4.	Program Penyelenggaraan Jalan 1 Program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	26.602.920.000,00
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah 3 Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4 Adminitrasi Umum Perangkat Daerah 5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.651.708.760,00 26.164.000,00 5.841.684.000,00 9.600.000,00 305.077.160,00 117.800.000,00 351.383.600,00

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)
6.	Program Pengembang Perumahan	
1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	18.330.000,00
2	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	0
3	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	16.872.659.200,00
4	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	0
5	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	344.000.000
7.	Program Kawasan Permukiman	
1	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	65.842.200,00
2	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	3.508.726.000
8.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	
1	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	4.200.000.000,00
9.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	
1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	676.282.100,00
Jumlah		71.326.613.440,00

2.2.2. Standar Penilaian Kinerja

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk, maka sesuai kesepakatan pada saat penyusunan Rencana Kinerja pada awal tahun telah kami tetapkan standar pencapaian sebagai berikut :

Nilai Capaian (dalam %)	Kategori Pencapaian Sasaran
80 – lebih dari 100	Tercapai
60 – 79	Kurang Tercapai
Kurang dari 60	Tidak Tercapai

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban penyelenggara pemerintahan untuk melaporkan serta mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi serta pencapaian tujuan stratejik dan sasaran-sasaran periodik yang diukur berdasarkan seperangkat indikator kinerja non keuangan (*performance indicators*) atau tingkat capaian program.

3.1. Capaian Kinerja

Capaian kinerja dihasilkan dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, namun digunakan untuk melakukan evaluasi dan penilaian terhadap tingkat keberhasilan dan ketidak-berhasilan pencapaian sasaran guna meningkatkan kinerja organisasi.

Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidak-berhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja.

Dari 2 sasaran yang telah ditetapkan dalam RKT tahun 2021, dua sasaran sudah tercapai. Adapun capaian sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut :

No	Sasaran	Pencapaian		
		Tercapai	Kurang Tercapai	Tidak Tercapai
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman	√		
2	Meningkatnya perumahan yang berkualitas	√		

Capaian sasaran tersebut dapat diketahui dengan terpenuhinya indikator sasaran sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA			
		Target %	Realisasi %	Capaian %	
1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman	1.1	Persentase Penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan air bersih dengan sistem perpipaan dan non perpipaan	83,36	99,85	119,78
	1.2	Persentase sistem air limbah skala Rumah tangga/komunitas/kawasan/kota	64,03	52,00	81,21
	1.3	Persentase Pemenuhan drainase lingkungan	89,69	79,84	89,02
	1.4	Persentase pemenuhan kebutuhan jalan lingkungan	79,45	76,24	95,96
	1.5	Persentase pengurangan Kawasan Kumuh	37,5	19,82	52,85
2. Meningkatnya perumahan yang berkualitas	1.6	Persentase ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau	92,46	86,62	93,68

Sasaran "Meningkatnya Perumahan dan Permukiman yang layak huni dan Meningkatnya Penyelesaian Masalah Pertanahan ", diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

- 1.1. Persentase penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan air bersih dengan sistem perpipaan dan non perpipaan merupakan indikator yang menggambarkan upaya pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sebagai sarana penunjang pembangunan perekonomian daerah.

Sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum yang unit distribusinya melalui perpipaan dan unit pelayanannya menggunakan sambungan rumah dan hidran umum. Sedangkan sistem penyediaan air minum dengan jaringan non perpipaan merupakan sarana bukan jaringan perpipaan terlindungi melalui sumur dangkal,

sumur pompa, bak penampungan air hujan, terminal air, dan dan bangunan penangkap mata air dalam rangka memenuhi kebutuhan akses air minum.

Kinerja pelayanan air bersih diukur berdasarkan jumlah penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan air bersih dengan sistem perpipaan dan non perpipaan dibagi dengan jumlah penduduk Kabupaten Nganjuk.

Capaian kinerja Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- Jumlah penduduk Kabupaten Nganjuk tahun 2021 1.133.909 jiwa
- Persentase target penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan air bersih dengan sistem perpipaan dan non perpipaan sampai dengan tahun 2021 83,36 %
- Jumlah penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan air bersih dengan sistem perpipaan sampai dengan tahun 2020 1.056.227 jiwa
- Jumlah penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan air bersih dengan sistem perpipaan pada tahun 2021 286.876 jiwa

Dengan rincian sebagai berikut :

- DAK Air Minum 4.634 jiwa
 - APBN PAMSIMAS 1.500 jiwa
 - HID PAMSIMAS 6.411 jiwa
 - APBD PAMSIMAS 1.704 jiwa
 - PDAM 7.324 jiwa
- Jumlah penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan air bersih dengan sistem non perpipaan sampai dengan tahun 2021 845.336 jiwa
- Dengan rincian sebagai berikut
- Sumur gali dengan pompa 344.452 jiwa
 - Sumur bor dengan pompa 500.884 jiwa
- Realisasi jumlah penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan air bersih dengan sistem perpipaan dan non perpipaan sampai dengan tahun 2021 1.132.212 jiwa
 - Persentase realisasi jumlah penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan air bersih dengan

sistem perpipaan dan non perpipaan sampai dengan tahun 2021	99,85 %
- Persentase capaian kinerja tahun 2021	119,78%

Persentase target penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan air bersih dengan sistem perpipaan dan non perpipaan sampai dengan tahun 2021 sebesar 83,36 %, dengan realisasi sebanyak 1.132.212 jiwa atau sebesar 99,85% dari total jumlah penduduk Nganjuk yang sebanyak 1.133.909 jiwa sehingga capaian kinerja indikator persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan air bersih adalah sebesar tercapai 119,78%.

Hasil Kegiatan :

PAMSIMAS

Kecamatan	Desa/Kel	Penerima Manfaat (jiwa)
Sukomoro	Pehserut	75
Pace	Jampes	425
Bagor	Selorejo	166
Sawahan	Kebonagung	257
Ngetos	Klodan	338
Ngetos	Kweden	103
Jatikalen	Dawuhan	117
Jatikalen	Dlururejo	223
Jumlah Total		1.704

HIBAH INSENTIF DAERAH (HID)

Kecamatan	Desa/Kel	Penerima Manfaat (jiwa)
Gondang	Nglinggo	724
Bagor	Bagorkulon	544
Ngluyu	Lengkonglor	441
Rejoso	Wengkal	519
Gondang	Jaan	1.423
Gondang	Sumberjo	1.157
Gondang	Ketawang	631
Jumlah Total		5.439

HID MAMA

Kecamatan	Desa/Kel	Penerima Manfaat (jiwa)
Lengkong	Jegreg	972
Jumlah Total		972

APBD PAMSIMAS

Kecamatan	Desa/Kel	Penerima Manfaat (jiwa)
Sukomoro	Bungur	750
Jatikalen	Pulowetan	750
Jumlah Total		1500

DAK BIDANG AIR MINUM

Hasil Kegiatan	Jumlah Terbangun (Sumbangan Rumah (SR))	Penerima manfaat (jiwa)
Pengembangan jaringan perpipaan, Desa Bareng, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk	269	911
Pengembangan jaringan perpipaan, Desa Margopatut Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk	227	681
Pengembangan jaringan perpipaan, Desa Sumberejo Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk	275	849
Pengembangan jaringan perpipaan, Desa Balongrejo Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk	177	611
Pengembangan jaringan perpipaan, Desa Puhkerep Kecamatan Rejso, Kabupaten Nganjuk	50	162
Pengembangan jaringan perpipaan, Desa Ngangkatan Kecamatan Rejso, Kabupaten Nganjuk	195	885
Pengembangan jaringan perpipaan, Desa Jintel Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk	268	535
Jumlah Total	1.461	4.634

1.2. Persentase sistem air limbah skala Rumah tangga/komunitas/kawasan/kota menggambarkan upaya pemerintah daerah dalam membangun dan menyediakan unit pengolahan setempat (tangki septik/MCK komunal) dan/atau berupa sistem pengolahan terpusat.

Kinerja pelayanan sistem air limbah diukur berdasarkan jumlah penduduk yang terlayani sistem air limbah skala Rumah tangga/komunitas/kawasan/kota dibagi dengan jumlah penduduk Kabupaten Nganjuk.

Capaian kinerja Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- Jumlah penduduk Kabupaten Nganjuk tahun 2021 1.133.909 jiwa
 - Persentase target jumlah penduduk yang terlayani sistem air limbah skala Rumah tangga/komunitas/kawasan/kota sampai dengan tahun 2021 64,03 %
 - Jumlah penduduk yang terlayani sistem air limbah skala Rumah tangga/komunitas/kawasan/kota sampai dengan tahun 2020 587.316 jiwa
 - Jumlah penduduk yang terlayani sistem air limbah skala Rumah tangga/komunitas/kawasan/kota pada tahun 2021 2.335 jiwa
- Dengan rincian sebagai berikut
- DAK 2.335 jiwa
 - Realisasi jumlah penduduk yang terlayani sistem air limbah skala Rumah tangga/komunitas/kawasan/kota sampai dengan tahun 2021 589.651 jiwa
 - Persentase realisasi jumlah penduduk yang terlayani sistem air limbah skala Rumah tangga/komunitas/kawasan/kota sampai dengan tahun 2021 52,00 %
 - Persentase capaian kinerja tahun 2021 81,21%

Persentase target jumlah penduduk yang terlayani sistem air limbah skala Rumah tangga/komunitas/kawasan/kota sampai dengan tahun 2021 sebesar 64,03 %, dengan realisasi sebanyak 589.651 jiwa atau sebesar 52,00% dari total jumlah penduduk Nganjuk yang sebanyak 1.133.909 jiwa sehingga capaian kinerja

indikator persentase sistem air limbah skala Rumah tangga/komunitas/kawasan/kota adalah sebesar tercapai 81,21%.

Hasil Kegiatan :

DAK BIDANG SANITASI

Kecamatan	Desa/Kel.	Jumlah Terbangun (unit)	Penerima manfaat (jiwa)
Sawahan	Sidorejo	85	250
Sawahan	Siwalan	50	375
Berbek	Sonopatik	75	375
Kertosono	Bangsri	75	250
Baron	Mabung	50	380
Sukomoro	Nglundo	76	280
Ngluyu	Gampeng	56	425
Jumlah Total		467	2335

- 1.3. Persentase pemenuhan drainase lingkungan menggambarkan upaya pemerintah daerah dalam membangun dan menyediakan drainase bagi lingkungan perumahan dalam rangka peningkatan pelayanan publik sehingga layak untuk dipergunakan dan meningkatkan kenyamanan lingkungan.

Kinerja pelayanan pemenuhan drainase lingkungan diukur berdasarkan jumlah penduduk yang terlayani drainase lingkungan dibagi dengan jumlah penduduk perkotaan Nganjuk.

Capaian kinerja dalam Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- Perkiraan jumlah penduduk perkotaan 407.967 Jiwa
- Persentase target pemenuhan drainase lingkungan sampai dengan tahun 2020 89,69 %
- Realisasi penduduk perkotaan yang terlayani drainase lingkungan sampai dengan tahun 2020 316.040 Jiwa
- Realisasi penduduk perkotaan yang terlayani drainase lingkungan pada tahun 2021 9.699 Jiwa
- Realisasi penduduk perkotaan yang terlayani drainase lingkungan sampai dengan tahun 2021 325.739 Jiwa
- Persentase realisasi pemenuhan drainase lingkungan sampai dengan tahun 2021 79,84 %
- Persentase capaian kinerja tahun 2021 89,02 %

Persentase target pemenuhan drainase lingkungan sampai dengan tahun 2021 adalah 89,69%, dengan realisasi penduduk perkotaan yang terlayani drainase lingkungan sampai dengan tahun 2021 adalah 325.739 Jiwa atau 79,84 % sehingga capaian kinerja sebesar 89,02 %.

- 1.4. Persentase pemenuhan kebutuhan jalan lingkungan menggambarkan upaya pemerintah daerah dalam membangun dan menyediakan jalan bagi lingkungan perumahan dalam rangka peningkatan pelayanan publik sehingga layak untuk dipergunakan dan meningkatkan kenyamanan lingkungan.

Kinerja pelayanan pemenuhan kebutuhan jalan lingkungan diukur berdasarkan panjang jalan lingkungan yang dibangun dibagi dengan panjang jalan lingkungan yang dibutuhkan.

Capaian kinerja selama tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- Panjang jalan lingkungan yang dibutuhkan	2.736 km
- Persentase target pemenuhan kebutuhan jalan lingkungan	79,45 %
- Panjang jalan lingkungan yang dibangun sampai dengan tahun 2020	2.056,80 km
- Panjang jalan lingkungan yang dibangun pada tahun 2021	29,20 km
- Realisasi panjang jalan lingkungan yang dibangun sampai dengan tahun 2021	2.086,00 km
- Persentase realisasi ketersediaan jalan lingkungan sampai dengan tahun 2021	76,24 %
- Persentase capaian kinerja tahun 2021	95,96 %

Persentase target pemenuhan kebutuhan jalan lingkungan sampai dengan tahun 2021 sebesar 79,45 %, dengan realisasi panjang jalan lingkungan yang dibangun/tersedia sampai dengan tahun 2021 sepanjang 2.086,00 km atau sebesar 76,24 % dari total panjang jalan lingkungan yang dibutuhkan tahun 2021 sehingga capaian kinerja sebesar 95,96 %.

Program kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai indikator sasaran penyediaan jalan lingkungan adalah :

- Pembangunan jalan lingkungan sepanjang 29,20 km.

- 1.5. Persentase pengurangan kawasan kumuh menggambarkan upaya pemerintah daerah dalam mengurangi kawasan kumuh di perkotaan sehingga layak untuk dihuni dan meningkatkan kenyamanan lingkungan.

Kinerja pelayanan pengurangan kawasan kumuh diukur berdasarkan luas kawasan kumuh yang tertangani di kabupaten dibagi dengan luas total kawasan kumuh yang ditetapkan di kabupaten tersebut.

Capaian kinerja selama tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- Luas kawasan kumuh sesuai SK Bupati Nganjuk Nomor 188/208/K/411.012/2020	131,2 Ha
- Persentase pengurangan kawasan kumuh s.d. akhir tahun 2021	37,5 %
- Realisasi pengurangan kawasan kumuh tahun 2021	28,00 Ha
- Persentase realisasi pengurangan kawasan kumuh s.d. akhir tahun 2021	19,82 %
- Persentase capaian kinerja tahun 2021	52,85 %

Persentase target pengurangan kawasan kumuh sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar 37,5 % dengan realisasi seluas 28,00 Ha atau sebesar 19,82 % dari total 131,2 Ha luas kawasan kumuh sesuai SK Bupati Nganjuk Nomor 188/208/K/411.012/2020. Capaian kinerjanya adalah sebesar 52,85 %.

- 1.6. Persentase ketersediaan rumah layak huni menggambarkan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

Kinerja pelayanan ketersediaan rumah layak huni diukur berdasarkan jumlah rumah layak huni dibagi dengan jumlah seluruh rumah.

Capaian kinerja selama tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- Jumlah rumah s.d.akhir tahun 2021	325.293 unit
- Persentase target rumah layak huni s.d. akhir tahun 2021	92,46 %
- Jumlah rumah layak Huni s.d. akhir tahun 2020	281.204 unit
- Realisasi penanganan rumah tidak layak huni pada tahun 2021	557 unit
- Jumlah rumah layak Huni s.d. akhir tahun 2021	281.761 unit
- Jumlah rumah tidak layak huni s.d. akhir tahun 2021	43.532 unit

- | | | |
|---|---|---------|
| - | Persentase realisasi rumah layak huni s.d. akhir tahun 2021 | 86,62 % |
| - | Persentase capaian kinerja tahun 2021 | 93,68 % |

Persentase target rumah layak huni yang difasilitasi pemerintah daerah sampai dengan tahun 2021 sebesar 92,46 %, realisasi jumlah rumah layak huni sampai akhir tahun 2021 adalah 281.761 unit atau 86,62 % sehingga capaian kinerja sebesar 93,68%.

Program kegiatan yang dilaksanakan tahun 2021 untuk mencapai indikator sasaran Persentase rumah layak huni adalah :

- Program BSPS, hasilnya pemugaran rumah sebanyak 190 unit.
- Pemugaran Rumah Tidak Layak huni (RTLH) sebanyak 185 unit
- DAK bidang Perumahan sebanyak 136 unit
- PAK (optimasi) sebanyak 33 unit
- Sisa DAK tahun sebelumnya sebanyak 13 unit.

Indikator sasaran/kinerja dalam sasaran “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman” dan ”Meningkatnya perumahan yang berkualitas” pada Urusan Perumahan menghasilkan nilai capaian 93,68 % berdasarkan skala ordinal, sehingga predikat pencapaian sasaran yang diperoleh termasuk dalam kategori **“Tercapai”**, kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah berhasil meningkatkan penyediaan infrastruktur dan kualitas lingkungan perumahan permukiman di wilayah kabupaten Nganjuk sebagaimana yang ditargetkan dalam tahun 2021.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019, 2020, dan 2021 serta perbandingan dengan Target Akhir Renstra (2023) dan Target Nasional:

Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja (%)			Target Akhir Renstra	Target Nasional
	2019	2020	2021	2023	
1. % penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan air bersih	86,63	89,13	95,68	85,46	81,77 (thn 2019)
2. % penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	55,38	55,70	38,14	69,81	60 (thn 2019)
3. % ketersediaan drainase lingkungan	77,48	77,78	79,84	92,51	
4. % terpenuhinya kebutuhan jalan lingkungan	74,97	75,18	76,24	81,95	
5. % rumah layak huni	87,26	86,98	86,62	95,96	

3.2. Realisasi Anggaran

Upaya pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk dengan program-program dan realisasi anggaran sampai akhir tahun 2021 sebagai berikut :

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum			
	1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	4.935.397.230,00	4.064.171.048,02	82,3

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah			
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.676.597.550,00	3.551.252.100,00	96,6
3.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase			
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.774.150.400,00	3.330.715.421,64	88,3
4.	Program Penyelenggaraan Jalan			
1	Program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	26.602.920.000,00	25.746.117.350,00	96,8
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.651.708.760,00		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.164.000,00	15.392.000,00	58,8
2	Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.132.000,00	5.788.000,00	52,0
3	Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.600.000,00	8.800.000,00	91,7
4	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	305.077.160,00	253.814.923,00	83,2
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	117.800.000,00	71.956.891,00	61,1
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	351.383.600,00	256.226.010,00	72,9

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
	Pemerintah Daerah			
6.	Program Pengembang Perumahan			
1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	18.330.000,00	4.025.500,00	22,0
2	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	0	0	0
3	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	16.872.659.200,00	12.098.922.796,06	71,7
4	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	0	0	0
5	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	344.000.000	256.014.000,00	74,4
7.	Program Kawasan Permukiman			
1	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	65.842.200,00	33.689.100,00	51,2
2	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di	3.508.726.000	3.105.953.140,00	88,5

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
	Bawah 10 (Sepuluh) Ha			
8.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh 1 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	4.200.000.000,00	3.903.737.240,00	92,9
9.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 1 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	676.282.100,00	444.693.638,65	65,8
	Jumlah	65.496.061.440,00	57.151.269.158,37	87,3

Alokasi per sasaran pembangunan tahun 2021 sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	Persentase Anggaran
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman	Persentase penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan air bersih	4.935.397.230,00	100
2	Meningkatnya perumahan yang berkualitas	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	3.676.597.550,00	
		Persentase ketersediaan drainase lingkungan	3.774.150.400,00	
		Persentase rumah layak huni	7.774.568.200,00	
		Persentase terpenuhinya kebutuhan jalan lingkungan	26.602.920.000,00	
Total anggaran			30.279.517.550	

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021

Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					821.156.760,00	611.977.824,00	69,95
Pencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					26.164.000,00	15.392.000,00	58,8
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					11.132.000,00	5.788.000,00	52,0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					9.600.000,00	8.800.000,00	91,7
Administrasi Umum Perangkat Daerah					305.077.160,00	253.814.923,00	83,2
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					117.800.000,00	71.956.891,00	61,1
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					351.383.600,00	256.226.010,00	72,9
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		83,36	95,68	114,78	4.935.397.230,00	4.064.171.048,02	82,3
Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan air bersih				4.935.397.230,00	4.064.171.048,02	82,3
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah		64,03	53,42	83,43	3.676.597.550,00	3.551.252.100,00	96,6
Pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai				3.676.597.550,00	3.551.252.100,00	96,6
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase		89,69	79,84	89,02	3.774.150.400,00	3.330.715.421,64	88,3

Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan drainase lingkungan				3.774.150.400,00	3.330.715.421,64	88,3
Program Penyelenggaraan Jalan		79,45	76,24	95,96	26.602.920.000,00	25.746.117.350,00	96,8
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan jalan lingkungan				26.602.920.000,00	25.746.117.350,00	96,8
Program Pengembang Perumahan					17.234.989.200,00	12.358.962.296,06	51,56
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					18.330.000,00	4.025.500,00	22,0
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota							
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					16.872.659.200,00	12.098.922.796,06	71,7
Pendistribusian dan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota							
Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan					344.000.000,00	256.014.000,00	61,0
Program Kawasan Permukiman		37,5	19,82	52,85	3.574.568.200,00	3.139.642.240,00	69,85
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha					65.842.200,00	33.689.100,00	51,2
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha					3.508.726.000,00	3.105.953.140,00	88,5

Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh		92,46	86,62	93,68	4.200.000.000,00	3.903.737.240,00	92,9
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota					4.200.000.000,00	3.903.737.240,00	92,9
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)					676.282.100,00	444.693.638,65	65,8
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan					676.282.100,00	444.693.638,65	65,8

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman	Persentase penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan air bersih	109,14	82,3	132,61
		Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	79,74	96,6	82,55
		Persentase ketersediaan drainase lingkungan	89,02	88,3	100,81
		Persentase terpenuhinya kebutuhan jalan lingkungan	95,96	96,8	99,13
2	Meningkatnya perumahan yang berkualitas	Persentase rumah layak huni	93,68	77,53	120,83

Kegiatan yang tidak terlaksana pada tahun 2021 :

No	Kegiatan
1	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
2	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

BAB IV

P E N U T U P

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk tahun 2021 merupakan laporan kinerja pelaksanaan Perjanjian Kinerja tahun 2021 yang menganalisis pencapaian kinerja kegiatan dan program kerja serta evaluasi dan analisis pencapaian 2 (dua) sasaran Renstra.

2. Untuk mencapai sasaran, “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman” dan ”Meningkatnya perumahan yang berkualitas”, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menetapkan beberapa indikator dengan capaian sebagai berikut : (a) penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan air bersih sebesar 109,14%; (b) penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai sebesar 59,57%; (c) ketersediaan drainase lingkungan sebesar 89,02%; (d) ketersediaan rumah layak huni sebesar 93,68%; (e) terpenuhinya kebutuhan jalan lingkungan sebesar 95,96%. Sehingga pada “Urusan Wajib Perumahan” menghasilkan nilai capaian 93,68% dan termasuk dalam kategori “**tercapai**”.

3. Rencana antisipasi yang akan dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk mengatasi berbagai masalah pada tahun sebelumnya yaitu :
 - Mempercepat pembentukan kepanitian kegiatan (PPK, PPTK, PPBJ, PPHP dan Pengawas).
 - Mempercepat proses perencanaan (survey, RAB, gambar dan lain-lain)
 - Menyegerakan pelaksanaan lelang (umum dan pengadaan langsung)

4. Penerapan sistem AKIP yang baik tersebut akan sangat berperan dalam meningkatkan perwujudan budaya akuntabilitas kinerja pada karyawan karyawan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan guna mewujudkan good governance.